

**STRATEGI DALAM MENGURANGI PEMBIAYAAN BERMASALAH
PADA KOPERASI SYARIAH
(Studi Pada Baitul Tamwil Muhamadiyah BiMU)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**

Oleh

**Redo Firmando
NPM : 1551020267**

Program Studi : Perbankan Syariah



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H/2020 M**

**STRATEGI DALAM MENGURANGI PEMBIAYAAN BERMASALAH
PADA KOPERASI SYARIAH
(Studi Pada Baitul Tamwil Muhamadiyah BiMU)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**



Pembimbing I : Dr. M. Nasrudin, M.Ag.
Pembimbing II : Nur Wahyu Ningsih, S.E., M.S.AK., Akt.

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H/2020 M**

ABSTRAK

Koperasi adalah lembaga Mikro yang berkembang di Indonesia. Hadirnya lembaga keuangan mikro ini, sangat diharapkan oleh masyarakat untuk membantu dalam menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang ada di masyarakat, contohnya dalam hal permodalan untuk mikro tidak tersentuh oleh lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan mikro yang dimaksud ini adalah koperasi, dimana ada 2 jenis koperasi yang kita ketahui saat ini yaitu koperasi konvensional dan koperasi syariah yang selama ini sering kita dengar dengan istilah BMT (Baitul Maal Wattamwil) dan juga Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM). Dalam penelitian ini, penulis akan meneliti Koperasi Syariah BTM BiMU.

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah Apa saja faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di Baitul Tamwil Muhammadiyah Bimu dan Apa saja strategi yang digunakan untuk menangani pembiayaan bermasalah di Baitul Tamwil Muhammadiyah Bimu.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Dimana sumber data yang digunakan sumber data primer dan sekunder. Menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi untuk mengumpulkan data. Analisis akan dilakukan dengan *editing* data, *organizing* data, dan terakhir akan dilakukan analisis data.

Hasil dari penelitian ini, Faktor Penyebab Pembiayaan Macet Pada Terhadap Produk Pembiayaan Faktor penyebab terjadinya pembiayaan macet pada produk pembiayaan *murabahah* pada BTM BiMU Bandar Lampung adalah kurang cermatnya petugas pembiayaan atau pihak BTM BiMU dalam menganalisis prinsip pemberian pembiayaan calon nasabah, data mengenai pembiayaan nasabah tidak didokumentasi dengan baik, dan juga faktor penyebab ada pada faktor internal dan eksternal. Adapun strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah di BTM BiMU Bandar Lampung adalah menggunakan sistem *rescheduling* atau penjadwalan ulang, sistem *reconditioning* atau perubahan persyaratan kembali dan restructuring atau penataan kembali.

Kata Kunci: Koperasi Syariah, Strategi Mengurangi Pembiayaan Bermasalah

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Redo Firmando

NPM : 1551020267

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “(Strategi Dalam Mengurangi Pembiayaan Bermasalah Pada Koperasi Syariah)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 13 Jan 2020

Penulis,

 

Redo Firmando

NPM. 1551020267



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung Telp.: (0721) 703160

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Strategi Dalam Mengursngi Pembiayaan Bermasalah
Dalam Pembiayaan Bermasalah Pada Koperasi
Syariah (studi BTM Bimu)**
Nama : **Redo Firmando**
NPM : **1551020267**
Prodi : **Perbankan Syariah**
Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis Islam**

MENYUTUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan di pertahankan dalam Sidang Munaqasyah

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Nasrudin, M.Ag
NIP. 195809241990031003

Nur Wahyu Ningsih, S.E., M.S.Ak., Akt.
NIP.

Mengetahui.
Ketua Prodi Perbankan Syariah

Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy
NIP. 198208082011012009



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Strategi Dalam Mengurangi Pembiayaan Bermasalah (Studi Pada Btm Bimu Bandar Lampung)** disusun oleh **Redo Firmando**, NPM: **1551020267**, Program Studi **Perbankan Syariah**, telah di ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan pada Hari/Tanggal : **Kamis, 22 April 2020**

TIM MUNAQOSYAH

Ketua : Ahmad Habibi, S.E, M.E

Sekertaris : Yusuf Bachtiar, M.E.

Penguji I : Fatih Fuadi, S.E.I, M.S.I.

Penguji II : Dr. Nasrudin, M.Ag

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Rustan Abdul Ghofur, M.S.I

NIP.198008012003121001

MOTTO

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya : Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkahlangkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu (Q.S. Al-Baqarah : 168).¹



¹ Deprtemen Agama RI, *Al-Quran Dan Tajwid & Terjemahan*, (Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2010), h. 25.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabiil'alamin dengan mengucap puji dan syukur kepada Allah SWT, atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, dan shalawat serta salam yang selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw. Dengan penuh rasa syukur dan tulus ikhlas skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua orang tua ku tercinta (Ayahanda Jaya Sukardi dan Ibunda Toharah) yang telah membesarkanku, mendidik, membimbing dan memberikan dukungan moril dan materil, yang senantiasa mendoakan ku disetiap langkah ku demi tercapainya cita-citaku. Terimakasih Ibu dan Ayah atas jasa, pengorbanan, dan keikhlasan membesarkan aku dengan tulus dan penuh kasih sayang.
2. Ketiga Kakak Ku Very Santoso Rica Destiana Cici Karmila dan Adiku Riski Ramadhan, yang selalu memberikan semangat dan motivasi serta turut mendoakan untuk mencapai keberhasilanku.
3. Almamater ku tercinta UIN Raden Intan Lampung tempatku menimba ilmu pengetahuan yang ku banggakan, semoga selalu jaya, maju dan berkualitas.
4. Teman-teman seperjuangan Perbankan Syariah G angkatan yang 2015 yang tak henti-hentinya memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini

RIWAYAT HIDUP

Redo Firmando dilahirkan di Bandar Lampung, kecamatan Tanjung Karang Barat pada tanggal 07 april 1995 anak Keempat dari Lima Bersaudara dari pasangan Bapak Jaya dan Ibu Toharah.

Pendidikan pertama kali di SDN 2 sukajawa dan lulus pada tahun 2009. kemudian melanjutkan sekolah di SMPN 17 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2012. Pada tahun 2012 Melanjutkan jenjang sekolah di SMA Perintis 2 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2015 . Tahun 2015 melanjutkan pendidikan strata 1 di Universitas Negeri Raden Intan Lampung terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Syariah pada saat itu dan sekarang FEBI pada jurusan Ekonomi Syariah melalui jalur UMPTKIN.

Riwayat hidup penulis belum selesai sampai disini, penulis mohon doanya agar senantiasa diberikan kemudahan baik hari ini maupun masa yang akan datang untuk selalu memperbaiki diri menjadi lebih baik lagi.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk sehingga skripsi dengan judul “ Strategi Dalam Mengurangi Pembiayaan Bermasalah Pada Koperasi Syariah pada BTM Bimu dapat diselesaikan. Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad Saw, para sahabat dan pengikut-pengikutnya yang setia.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program strata satu (S1) jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar sarjana. Penyelesaian skripsi ini tidak akan terlaksana tanpa bantuan, kerjasama, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan mahasiswa.
2. Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy selaku ketua Prodi Perbankan Syariah yang selalu memberikan dukungan kepada mahasiswanya.
3. Dr. M. Nasrudin, M.Ag.. (Pembimbing I) dan Nur Wahyu Ningsih, S.E., M.S.AK., Akt. (Pembimbing II) sebagai dosen pembimbing saya yang senantiasa memberikan masukan, saran, kritik, dan telah meluangkan banyak waktunya untuk membimbing penulis hingga skripsi ini terselesaikan.

4. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik dan memberikan ilmunya serta motivasi kepada penulis.
5. Kepada anggota Kultra kelompok 13 serta kelompok KKN 203 yang senantiasa mendukung dan mendoakan ku dan teman-teman seperjuangan, Ricki, Budi, Irvan, Fahmi, pungky, terimakasih atas do'a dan dukungan selama ini.
6. Adik-adik Prodi Perbankan Syariah yang sedang berjuang menyelesaikan studinya tetap semangat dan kembangkan prestasi, kemampuan yang ada untuk mengharumkan citra kampus tercinta ini.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Hal tersebut dikarenakan adanya keterbatasan waktu, dana dan kemampuan yang peneliti miliki. Untuk itu para pembaca sekiranya dapat memberikan masukan dan saran-saran guna melengkapi hasil penelitian ini. Peneliti berharap hasil penelitian ini akan menjadi sumbangsih dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 3 Febuari 2020
Penulis,

Redo Firmando
NPM. 1551020267

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Rumusan Masalah	11
E. Tujuan Dan Manfaat	11
F. Metode penelitian	13

BAB II KAJIAN TEORI

A. Teori Pembiayaan Islam.....	
1. Pengertian Pembiayaan.....	20
2. Pembagian Pembiayaan.....	22
3. Tujuan Pembiayaan	23
4. Jenis Pembiayaan.....	24
5. Produk Pembiayaan	27
B. Pembiayaan dan Strategi Mengurangi Pembiayaan bermasalah	
1. Pembiayaan Bermasalah.....	35
2. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah	41
C. Baitul Mal Wattamwil	42
D. Tinjauan Pustaka	47

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran umum Baitul Tamwil Muhamadiyah.....	51
B. Deskripsi Data Penelitian	63

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Analisis Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BTM BiMU	70
B. Analisis Strategi yang digunakan untuk menangani pembiayaan bermasalah BTM BiMU	77

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	83
B. Saran	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Data BMT di Indonesia.....	8
1.2 Data Koperasi di Indonesia	9
1.3 Data Koperasi dan BMT di Provinsi Lampung	10

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 01	Pedoman wawancara, observasi dan dokumentasi
Lampiran 02	Data kolektibilitas (sesuai pengolongan RAC)
Lampiran 03	Data laporan sisa hasil usaha
Lampiran 04	Surat izin pra riset
Lampiran 05	Surat izin riset
Lampiran 06	Surat keputusan pembimbing dari dekan fakultas
Lampiran 07	Berita acara seminar proposal
Lampiran 08	Dokumentasi
Lampiran 09	Kartu konsultasi bimbingan skripsi

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Agar memudahkan dalam memahami judul skripsi ini dan tidak menimbulkan kesalahpahaman bagi para pembaca maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi disinterpretasi terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.

Adapun judul skripsi ini adalah **STRATEGI DALAM MENGURANGI PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA KOPERASI**. Untuk itu perlu uraian pengertian dari istilah judul tersebut sebagai berikut:

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap sesuatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.²
2. Strategi dapat di definisikan sebagai seni dan ilmu untuk mengformulasi, mengimplentasi dan mengevaluasi.³
3. Pembiayaan atau kredit adalah hak untuk menerima pembayaran kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta, atau pada waktu yang akan datang, karena penyerahan barang-barang sekarang.⁴

² *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Pusat Bahasa Edisi IV, Jakarta: P T Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 58.

³ David, Fred R, *Manajemen Strategis*, (Jakarta: Edisi 10 Gramedia, 2009), h. 6.

4. Bermasalah atau Risiko adalah ancaman atau kemungkinan suatu tindakan atau kejadian yang menimbulkan dampak yang berlawanan dengan tujuan yang ingin dicapai.⁵

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan dipilihnya judul ini adalah :

1. Secara Objektif
 - a. Ketertarikan peneliti terkait perkembangan koperasi saat ini, dimana lembaga inilah yang membantu pengusaha-pengusaha mikro/kecil dalam kesulitan permodalan yang dialami.
 - b. Koperasi adalah lembaga yang mencari keuntungan tidak hanya untuk lembaga itu sendiri, tetapi untuk kesejahteraan seluruh anggota.
 - c. Lembaga keuangan sangat dibutuhkan bagi masyarakat pada umumnya. Khususnya koperasi yang banyak muncul di tengah masyarakat, fungsi koperasi sendiri sudah dirasakan sejak dulu dengan konsep perbankan baik yang berbentuk Syariah maupun konvensional
2. Secara subjektif
 - a. Pokok bahasan penelitian skripsi ini dengan disiplin ilmu yang menyusun pelajari di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

⁴ Thamin Abdullah dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Jakarta : Rajawali Pers, 2013, hlm. 163

⁵ Ferrry N. Idroes, *Manajemen Risiko Pembiayaan Cet. 1*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 4

- b. Literature dan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini tersedia di perpustakaan, Bank Syariah Mandiri, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

C. Latar Belakang Masalah

Koperasi mempunyai peran penting dalam tercapainya kesejahteraan bagi anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. Koperasi dalam kegiatannya memiliki dua karakter yang khas yaitu bersifat ekonomi dan berwatak sosial artinya meskipun dalam pokok usahanya berprinsip ekonomi, koperasi tetap mementingkan pendidikan pengkoperasian bagi anggota dan juga masyarakat.⁶ Serta koperasi dalam melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan hukum dan undang-undang yang telah ditetapkan.

Kegiatan usaha koperasi merupakan penjabaran dari UUD 1945 Pasal 33 ayat (1). Dengan adanya penjelasan UUD 1945 Pasal 33 ayat (1) koperasi berkedudukan sebagai sokoguru perekonomian nasional dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam system perekonomian nasional. Sebagai salah satu pelaku ekonomi, koperasi merupakan organisasi ekonomi yang berusaha menggerakkan potensi sumber daya ekonomi demi memajukan kesejahteraan anggota. Karena sumber daya ekonomi tersebut terbatas, dan dalam mengembangkan koperasi harus mengutamakan kepentingan anggota, maka

⁶Panji anoraga *koperasi kewirausahaan dan usaha kecil*, (Jakarta: rineka cipta, 2002),h. 17

koperasi harus mampu bekerja semaksimal mungkin dan mengikuti prinsip – prinsip koperasi dan kaidah-kaidah ekonomi.⁷

Undang-undang Dasar Republik Indonesia menempatkan koperasi sebagai sokoguru perekonomian Indonesia. Atas Dasar itu maka koperasi sebagai salah satu perusahaan permanen yang memungkinkan koperasi untuk berkembang secara ekonomis, dan dengan demikian tidak saja akan mampu memberikan pelayanan terus menerus dan meningkatkan ke para anggotanya serta masyarakat sekitarnya, akan tetapi juga akan memberikan sumbangan yang mendasar kepada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.⁸

Hadirnya lembaga keuangan mikro ini, sangat di harapkan oleh masyarakat untuk membantu dalam menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang ada di masyarakat, contoh nya dalam hal permodalan untuk mikro tidak tersentuh oleh lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan mikro yang dimaksud ini adalah koperasi, dimana ada 2 jenis koperasi yang kita ketahui saat ini yaitu koperasi konvensional dan koperasi syariah yang selama ini sering kita dengar dengan istilah BMT (Baitul Maal Wattamwil) dan juga Baitul Tamwil Muhamdiyah (BTM).

Menurut Bahasa, Baitul Tamwil berasal dari gabungan dua pengertian, yaitu Bait yang artinya rumah dan Tamwil (pengembangan harta kekayaan) yang asal katanya Maal atau harta. Secara keseluruhan Baitul Tamwil dimaknai sebagai tempat untuk mengembangkan harta kekayaan. Pengertian dua suku kata itulah yang kemudian digunakan sebagai penamaan untuk

⁷Veithzal Rivai, *Financial Institution Management*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), h. 639

⁸ Sedarsono dan Edilius, *Manajemen Koperasi Indonesia*, (Jakarta : RinekaCipta, 2007),h. 31

lembaga keuangan mikro, yaitu berfungsi sebagai lembaga pemberdayaan pedagang.⁹

BTM adalah kependekan dari Baitul Tamwil Muhammadiyah, yaitu lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah artinya semua transaksi keuangan dilakukan dengan akan sesuai syariat islam. Sedangkan kedudukan lembaga keuangan tersebut merupakan Amal Usaha Ekonomi Muhammadiyah.¹⁰

Pembiayaan yang diberikan oleh BMT pada dasarnya terdiri dari tiga model pembiayaan dengan sistem bagi hasil, pembiayaan jual beli dengan keuntungan, dan pembiayaan kebajikan. Pembiayaan dengan sistem bagi hasil terdiri dari dua bentuk, yaitu pembiayaan 100% tanpa campur tangan BMT dalam pengelolaan usaha yang disebut pembiayaan mudharabah, dan pembiayaan yang kurang dari 100% dengan pilihan BMT boleh ikut mengelola usaha atau boleh juga tidak ikut mengelola usaha, yang disebut pembiayaan *Musyarakah*.

Dalam penelitian ini, penulis akan meneliti di sebuah koperasi syariah di Bandar Lampung yaitu Baitul Tamwil Muhamadiyah (BTM) BiMU, dimana koperasi syariah BTM BiMU ini terbesar sebagai Koperasi syariah di Bandar Lampung dan terbesar ke dua dalam jenis koperasi secara umum.

⁹Ma'had Alif Tarbiyah Mubalghin Muhammadiyah, *Pedoman Pendirian BTM*, (Bandar Lampung, 2008),h. 4

¹⁰A. Djazuli, Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat, Sebuah Pengenalan* (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2002,) h. 183

Tabel 1.1
Data Realisasi Pembiayaan
BTM BiMU

NO	Nama Koperasi	Tanggal Badan Hukum	Jumlah Anggota
1	Koperasi Kredit Mekar Sai	8/4/1999	16.053
2	KSPPS BTM BiMU	5/10/2005	10.901
3	KSP dan Pembiayaan Syariah Al-Fadhila	14/7/2015	5000
4	Kopdit Sejahtera	27/1/2005	1.854
5	Kopdit Wahana Artha Selaras	20/8/2002	1.377

Sumber : Data diolah dari Kementerian Koperasi dan UMKM RI 2019

Di dalam tabel 1. menunjukkan urutan 5 besar Koperasi yang terbesar dilihat jumlah keanggotaan nya, dari 40 Koperasi yang berjenis Koperasi Simpan Pinjam di Kota Bandar Lampung. Dan di Kota Bandar Lampung sendiri terdapat 305 Koperasi yang terdata pada Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Republik Indonesia.

Dalam penelitian ini, penulis akan meneliti di sebuah Koperasi Syariah di Bandar Lampung yaitu Baitul Tamwil Muhammadiyah Bina Masyarakat Utama (BTM BiMU). Dimana Koperasi syariah tersebut termasuk Koperasi yang berkembang dan cukup besar di Bandar Lampung.

BTM BiMU merupakan suatu koperasi yang bergerak dalam simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Didirikan oleh Majelis Ekonomi dan kewirausahaan. Pimpinan wilayah muhamadiyah (PWM) provinsi lampung pada tahun 2004 dengan nama koperasi syariah BTM Bandar lampung, namun sesuai dengan RAT TB 2015 berubah menjadi KSPPS BTM BiMU adalah suatu lembaga yang melakukan kegiatan pengembangan usaha

produktif dan investasi dalam meningkatkan kesejahteraan pengusaha mikro melalui kegiatan pembiayaan dan menabung.¹¹

Pembiayaan jual beli dengan keuntungan terdiri dari dua bentuk, yaitu pembelian barang untuk nasabah dengan pembayaran dilunasi pada jangka waktu tertentu, yang disebut dengan pembiayaan *Murabahah*, dan pembeli barang untuk nasabah dengan pembayaran dilakukan secara mencicil sampai lunas, yang disebut pembiayaan Baitul Mal Wat Tamwil. Pembiayaan kebajikan merupakan pembiayaan yang dananya berasal dari titipan BAZIS. Oleh karena itu hanya dibeikan kepada calon nasabah yang memenuhi syarat menerima zakat, infaq, dan sedekah. Pembiayaan kebajikan tidak dikenai biaya apapun, hanya diharuskan mengembalikan dalam jumlah semula karena merupakan titipan amanah.¹²

Akan tetapi dalam pembiayaan juga tidak semata-mata berjalan dengan mulus banyak terjadi pembiayaan bermasalah. Adapun dalam ajaran Islam terkandung tiga prinsip yang berkaitan dengan kredit, yaitu prinsip perjanjian, prinsip pembayaran, prinsip bantuan.

Pembiayaan bermasalah terjadi dikarenakan terdapat suatu penyimpangan utama dalam pengembalian pinjaman yang berakibatkan terjadi kelambatan dalam pengembalian sesuai dengan waktu pengembalian yang telah disepakati atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan terjadinya bagi koperasi.¹³

Adapun pembiayaan bermasalah yang terjadi pada BTM BiMU ialah sebagai berikut.

¹¹ www.btm-BiMU.id diakses pada 29 juni 2019 pukul 10.11 WIB

¹² Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, Jakarta : PT Kharisma Putra Utama, 2015, h.. 325

¹³ Novemy triyandari, “Strategi Penyelesaian Kredit Bermasalah untuk mencegah financial distress pada koperasi jasa keuangan syariah” *jurnal senatib* Vol.01 No. 4 November 2017, h. 381.

Tabel 1.2
Data Anggota Pembiayaan Bermasalah Tahun
2016- 2018 KSPPS Baitul Tamwil Muhamadiyah.

Pembiayaan	2016	2017	2018
Murabahah	9	17	8
Hiwalah	9	5	4
Ijarah	9	4	4
Musyarokah	0	5	5
Mudharabah	0	5	4
Qordhu hasan	9	6	6
Istishna	9	6	6 ¹⁴

Sumber: *Baitul Tamwil MUhamdiyah BiMU*, diolah 2018

Dari data di atas produk pembiayaan bermasalah pada BTM BiMU terletak pada akad Murabahah yang mana dari tahun 2016 -2018 berjumlah 34 anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah.

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Strategi Dalam Mengurangi Pembiayaan Bermasalah Pada Koperasi (Studi Baitul Tamwil Muhammadiyah Bimu)**”

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di Baitul Tamwil Muhammadiyah Bimu?
2. Bagaimana strategi yang digunakan untuk menangani pembiayaan bermasalah di Baitul Tamwil Muhammadiyah Bimu?

¹⁴ Dhia, (Bidang HRD Baitul Tamwil Muhamdiyah Bimu), Wawancara, Pada Tanggal 15 agustus 2019 Pukul 10.00 WIB

E. Pokus Masalah

Agar Penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, mendalam dan lebih terarah, peneliti memandang permasalahan penelitian yang di angkat perlu di batasi variabelnya. Oleh sebab itu, penulis membatasi diri dengan hanya mengkaji tentang pembiayaan bermasalah dalam produk jual beli pada Baitul Tamwil Muhammadiyah Bimu .

F. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk jual beli di Baitul Tamwil Muhammadiyah Bimu.
2. Untuk mengetahui strategi yang digunakan untuk menangani pembiayaan bermasalah pada produk jual beli di Baitul Tamwil Muhammadiyah

Bimu

G. Manfaat Penelitian

Hal penting dari sebuah penelitian adalah kemanfaatan yang dapat dirasakan atau diterapkan setelah terungkapnya hasil penelitian. Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang koperasi syariah maupun

koperasi konvensional sebagai salah satu bagian pengembang dari ekonomi Indonesia.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Koperasi

Untuk bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan masing-masing koperasi untuk meningkatkan lagi kualitas dari sisi manajemen pembiayaan dan manajemen risiko.

b. Bagi Penulis

Tulisan ini memberikan manfaat bagi penulis berupa pemahaman yang lebih mendalam lagi mengenai koperasi syariah dan koperasi konvensional khususnya manajemen dari kedua jenis koperasi tersebut, serta memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Studi Perbankan Syariah.

c. Menambah khasanah pengetahuan dalam memahami perbedaan manajemen pembiayaan dan manajemen risiko dari koperasi syariah dengan manajemen kredit dan manajemen risiko dari koperasi konvensional serta sebagai masukan pada penelitian dengan topik yang sama yang akan datang.

H. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara

ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara – cara yang digunakan. Sistematis adalah proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.¹⁵

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Hakikatnya penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian.

Penelitian ini bertujuan menemukan data-data yang bersumber dari lapangan yakni BTM BiMU. Didukung pula dengan penelitian pustaka (*library reseach*) yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi dengan bantuan material, buku, buku, catatan, catatan, dokumen, dan referensi lainnya yang berkaitan dengan sistem pemberian kredit.

3. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, Analitis yaitu penelitian yang berusaha untuk menentukan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi peneliti juga menyajikan data,

¹⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h.3.

menganalisis dan menginterpretasikannya.¹⁶ Cara yang dilakukan peneliti dengan mengumpulkan data-data dari lapangan yang berupa wawancara dan catatan hasil penelitian dilapangan.

4. Sumber Data

Untuk mengumpulkan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan data sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan sebuah informasi data yang diperoleh penulis secara langsung dari tempat objek penelitian. Dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh langsung dari pengamatan penulis, serta data pertanyaan yang berupa wawancara kepada pihak BTM BiMU

b. Data Sekunder

Selain data primer, sebagai pendukung dalam penelitian ini penulis juga menggunakan data sekunder. Data yang didapat dari catatan, buku, dan majalah artikel, buku-buku sebagai teori, majalah, dan lain sebagainya.¹⁷ Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data dari perpustakaan, didapat dari buku-buku literature dan data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada dilembaga yang berkaitan dengan masalah

¹⁶*Ibid.*, h.60

¹⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016, h.89.

5. Populasi Dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁸

Populasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seluruh anggota yang melakukan pembiayaan bermasalah pada *Baitul Tamwil Muhamadiyah* BiMU pada tahun 2016 - 2018 produk murabahah berjumlah 34 anggota dan produk Hiwalah berjumlah 18 anggota, Ijarah 17 hiwalah 18 musyarakah 10 mudharabah 9 qardul hasan 21 Istishna 21 serta karyawan berjumlah 3 orang. Sehingga total jumlah populasi adalah 130 anggota.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan penelitian tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka penelitian ini dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu.¹⁹

Berdasarkan penentuan jumlah sampel dan *sampling*, menurut Suharsini Arikunto jika subjek <100 , lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2007) h.80.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung, Alfabeta, 2016),

jika jumlah subjeknya besar atau >100, dapat diambil 10% -15% atau 20% - 25% atau lebih.²⁰ Pada penelitian ini tingkat populasi yang diambil sebesar 10% dari jumlah populasi sebanyak 130 anggota. Jadi sampel yang diambil sebanyak 13 orang.

Dari jumlah populasi yang akan peneliti ambil sampel sebesar 10%. Dalam penelitian ini, teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu dalam artian orang atau narasumber tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti.²¹

6. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Jadi dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi.²² Dalam hal ini wawancara akan

²⁰*Ibid.*, h. 300.

²¹*Ibid.*, h. 32

²² Sugiyono, *Op.Cit*, h. 316

dilakukan dengan manajer BTM BiMU dan nasabah untuk mengetahui data tentang prosedur pemberian kredit.

b. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuisioner. Kalau wawancara dan kuisioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak sebatas dengan orang, tetapi juga obyek-obyek alam yang lain.²³ Metode ini merupakan pengumpulan-pengumpulan data dengan cara mengamati langsung terhadap obyek tertentu yang menjadi focus penelitian serta mencatat tentang sesuatu yang berhubungan tentang penerapan prosedur pemberian kredit di BTM BiMU di Bandar lampung.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu poses mencari data mengenai hal-hal yang biasanya berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup sketsa dan lain-lain.²⁴ Dalam dal ini, penulis mengumpulkan dat-dat dengan arsip, buku, brosur dan lain sebagainya yang ada di kantor BTM BiMU di Bandar lampung

²³*Ibid.*, h. 196

²⁴*Ibid.*, h. 326

7. Analisis dan Pengelolaan Data

Setelah berbagai data terkumpul, maka untuk menganalisis digunakan teknik deskriptif analisis yaitu teknik untuk menggambarkan atau menjelaskan data yang terkait dengan pembahasan, dimana teknik ini menggambarkan tentang penerapan manajemen pembiayaan dan manajemen risiko. Untuk mendapatkan data yang lebih akurat perlu adanya pengelolaan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

a. *Editing*

Memeriksa kembali semua data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.²⁵ Penulis menggunakan teknik ini untuk memeriksa kelengkapan data-data yang sudah didapat dan akan digunakan sebagai sumber data penelitian.

b. *Organizing*

Mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokkan data yang diperoleh.²⁶ Langkah ini yang diambil penulis setelah melakukan editing, dimana bertujuan untuk memudahkan memahami tentang permasalahan yang ada. Dengan teknik ini diharapkan penulis dapat memperoleh gambaran tentang bagaimana perbedaan

²⁵Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*(Jakarta: Bumi Aksara), h.153

²⁶*Ibid.*, h. 154

manajemen pembiayaan dan manajemen risiko pada koperasi syariah dan koperasi konvensional dimana dalam penelitian ini BTM BiMU

c. Analyzing

Analisis adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²⁷

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan deskriptif kualitatif. Metode pendekatan deskriptif kualitatif ini menginterpretasikan dengan tabel-tabel, grafik-grafik, atau angka-angka yang ada kemudian melakukan uraian dan penafsiran pada tiap variable yang akan di analisis sehingga mendapatkan hasil guna memecahkan masalah dalam penelitian.

Setelah dilakukan editing, organizing dan analyzing, penulis akan mengambil kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang ada pada penelitian.

²⁷Kaelan M.S, *Metode penelitian kualitatif interdisipliner*, (Yogyakarta : Paradigma, 2012), h. 335.

BAB II

STRATEGI MENGURANGI PEMBIAYAAN BERMASALAH DI KOPERASI SYARIAH

A. Teori Strategi Pembiayaan Bermasalah

1. Pengertian Pembiayaan

Pengertian pembiayaan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam keputusan Menteri Koperasi Usaha kecil dan Menengah No. 91 tahun 2004 yang menyatakan bahwasanya pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara pihak koperasi dengan anggota, yang mana mewajibkan penerima pembiayaan itu wajib untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad disertai dengan pembiayaan sejumlah bagi hasil dari suatu pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana tersebut.²⁸

Pembiayaan disebut juga dengan kredit di lembaga keuangan konvensional, pada dasarnya sebuah kesepakatan antara lembaga keuangan dengan nasabahnya yang memerlukan dana untuk membiayai kegiatan atau aktivitas tertentu.²⁹

Menurut Ahmad Muliadi, pembiayaan adalah perbuatan untuk membiayai baik perorangan maupun bentuk perusahaan. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau

²⁸Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 35.2/Per/M.KUM/X. Jakarta, 2011. h. 4.

²⁹Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 202

pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh pemerintah, pemerintah daerah, duni usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan usaha mikro, kecil, dan menengah.³⁰

Terkait pasal 1 ayat 25 di dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Menyebutkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang di persamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *Ijarah mutanhiya bit tamlik*.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*.
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk *qard*.
- e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *Ijarah* untuk transaksi multi jasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariaiah dan UUS (Unit Usaha Syariah), dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau pihak yang diberi fasilitas dana untuk mengmbalikan dana tersebut setelah jangka

³⁰ Ahmad Muliadi, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Jakarta: Akademia Permata, 2013), h. 3.

waktu tertentu dengan imbalan *Ujrah*, tanpa imbalan dan bagi hasil.³¹

Undang-undang di atas dapat disimpulkan bahwasanya pembiayaan bukan bersifat uang yang berdiri sendiri, melainkan penyediaan dana yang hanya dapat dilakukan melalui akad-akad yang ditemukan.³²

Pembiayaan secara ekonomi dapat diartikan sebagai pemindahan daya beli dari satu tangan ke tangan lain atau penciptaan daya beli.³³

Yang mana pembiayaan yaitu suatu bentuk pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak lain untuk mendukung investasi yang akan direncanakan, baik dilakukan diri sendiri maupun lembaga.³⁴

2. Pembagian Pembiayaan

Pembiayaan menurut sifat pengunanya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut:³⁵

- a. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu peningkatan usaha baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.
- b. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

³¹Undang-undang No.21 Tahun 2008 Tentang Pembiayaan di Perbankan Syariah

³²Fordeby Adesy, *Ekonomi dan Bisnis Islam Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016). h. 30-31.

³³Veitzhal Rivai dan Andria Permata Veitzhal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2008). h. 2.

³⁴Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: YKPN, 2005). h. 7.

³⁵Muhamad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001). h. 160

3. Tujuan Pembiayaan

Pembiayaan merupakan sumber pendapatan lembaga keuangan Syariah. Tujuan pembiayaan yang dilakukan lembaga keuangan Syariah terkait yakni :³⁶

a. Pemilik

Dari sumber pendapatan di atas, para pemilik mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanam pada lembaga keuangan tersebut.

b. Pegawai

Para pegawai mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari lembaga keuangan yang dikelolanya.

c. Masyarakat

Yang pertama sebagai pemilik, mereka mengharapkan dari dana yang di investasikan akan di peroleh bagi hasil. Yang ke dua debitur yang bersangkutan para debitur dengan peyediaan baginya, mereka terbantu guna menjalankan usahnya (sector produktif) atau terbantu untuk pengadaan barang yang di inginkan (pembiayaan konsumtif). Yang ke tiga masyarakat umumnya atau konsumen, mereka dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkannya

d. Pemerintah

Akibat penyediaan pembiayaan pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan negara yang mana diperoleh pajak dari, lembag keuangan.

³⁶*Ibid*, h. 303-304.

e. Bank atau lembaga keuangan

Bagi lembaga keuangan yang bersangkutan, hasil dari penyaluran pembiayaan, diharapkan bank dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap bertahan dan meluas jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat di layaninya.

4. Jenis-Jenis Pembiayaan

a. Dilihat dari segi kegunaanya

1) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang biasanya biasa digunakan untuk keperluan kepuasan usaha membangun proyek atau pabrik baru dimana masa pemakaiannya untuk satu periode yang lebih lama.

2) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya, biasa digunakan untuk membeli bahan baku, membayar gaji karyawan yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan pembiayaan investasi yang sudah ada.³⁷

b. Dilihat dari segi jangka waktu

1) Pembiayaan jangka pendek, pembiayaan ini memiliki jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun, dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

³⁷Kasmir, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003). h. 76

- 2) Pembiayaan jangka menengah antara satu tahun sampai tiga tahun, biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja, beberapa bank mengklasifikasikan pembiayaan menengah sebagai pembiayaan jangka panjang.
- 3) Pembiayaan jangka panjang, merupakan pembiayaan yang masa pengembaliannya paling panjang, yaitu diatas tiga tahun sampai lima tahun. Biasanya pembiayaan ini digunakan untuk investasi jangka panjang.³⁸

c. Dilihat dari segi jaminan

- 1). Pembiayaan dengan Jaminan, merupakan pembiayaan yang diberikan suatu jaminan tertentu. Jaminan tersebut dapat berupa barang berwujud atau barang tak berwujud. Artinya barang yang dikeluarkan dilindungi senilai jaminan yang diberikan calon debitur.
- 2). Pembiayaan tanpa Jaminan, yaitu pembiayaan yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Pembiayaan ini diberikan dengan cara melihat prospek usaha, serta loyalitas calon debitur selama hubungan dengan bank yang bersangkutan.³⁹

d. fungsi dan Manfaat pembiayaan

- 1). Pemberian suatu pembiayaan mempunyai fungsi tertentu
Adapun fungsi pembiayaan yaitu:

³⁸ Kasmir, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003). h. 77

³⁹ *Ibid*, h. 77

- (1). Memberikan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang tidak memberatkan debitur.
- (2). Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional.
- (3). Membantu mensyaratkan ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh renternir dengan mambanntu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan.
- (4). Membuka kesempatan kerja, dalam hal ini untuk pembiayaan pembangunan usaha hingga dapat mengurangi pengangguran.

2). Pembiayaan memiliki manfaat sebagai berikut:

(1). Manfaat bagi Lembaga Keuangan Syariah

Manfaat yang didapat oleh lembaga keuangan syariah yaitu memperoleh pembagian keuntungan dari debitur sehingga dapat membiayai operasional lembaga keuangan tersebut. Dengan pembiayaan tersebut, lembaga keuangan berperan meningkatkan ekonomi rakyat serta menjalin silaturahmi antara nasabah dengan pihak lembaga keuangan syariah.

(2). Manfaat Debitur

Adapun manfaat yang didapat debitur adalah debitur tidak akan dituntut untuk pengembalian pinjaman dengan sejumlah bagi hasil yang terlalu besar, dan debitur juga

tidak dibebani oleh sejumlah bunga, namun akan memberikan nisbah bagi hasil yang telah disepakati.⁴⁰

5. Produk-Produk Pembiayaan

a. Pembiayaan Modal Kerja

1). Bagi hasil

Kebutuhan modal kerja usaha yang beragam, seperti untuk membayar tenaga kerja, rekening listrik dan air, bahan baku, dan sebagainya. Dengan berbagi hasil, kebutuhan modal kerja pihak pengusaha terpenuhi, sementara kedua belah pihak mendapatkan manfaat dari pembagian resiko yang adil.⁴¹ Kemudian pembiayaan yang berperinsif bagi hasil terdiri dari dua yaitu:

a) *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *dharab*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya. *Mudharabah* adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*)

untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai Syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah

⁴⁰Muhammad Syafe'I Antoni, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 167.

⁴¹Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011) h. 124-125.

pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.⁴²

Adapun landasan hukum akad *Mudharabah* Sebagaimana terdapat dalam Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Muzzamil 20 yang berbunyi:

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۚ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَاقْرَأُوا مَا تيسَّرَ مِنْهُ ۚ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۚ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٠﴾

Artinya: *Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*⁴³

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama

Indonesia Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-

MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Mudharabah*,

⁴²Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: Kompas Gramedia Building, 2012), h. 192.

⁴³Tim Penerjemah Al-Quran Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Quran, 2010), h. 376.

memutuskan menetapkan fatwa tentang pembiayaan *mudharabah* (qiradh).⁴⁴

b) *Musyarakah*

Musyarakah adalah akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan.⁴⁵ Pada koperasi syariah, *Musyarakah* adalah suatu bentuk kerja sama antara *Baitul Mal Wattamwil* dengan para anggotanya. Baik *Baitul Mal Wattamwil* maupun anggotanya masing-masing menyetorkan sebagian modal usaha. *Baitul Mal Wattamwil* pembiayaan *Musyarakah* digunakan *Baitul Mal Wattamwil* untuk memfasilitasi pemenuhan sebagian kebutuhan permodalan anggotanya, guna menjalankan usaha atau proyek yang disepakati.⁴⁶

Adapun landasan hukum akad *Musyarakah* Sebagaimana terdapat dalam Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Sad 24 yang berbunyi:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ
الْخُلَطَاءِ لِيَبْغَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۖ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ
وَحَزَرَ ۚ رَٰكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

⁴⁴Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia , Fatwa DSN Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah*

⁴⁵Mervyn K. Lewis dan Latifa M.Algaoud, *Perbankan Syariah, Prinsip, praktik dan prospek*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2003), h. 63.

⁴⁶Sumber SOP KSPPS Baitul Tamwil Muhammadiyah BiMU.

Artinya: Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.⁴⁷

2). Pembiayaan Investasi

1). Akad Pola Sewa

Transaksi nonbagi hasil selain yang berpola jual beli adalah transaksi berpola sewa atau *Ijarah*. *Ijarah*, istilah *Ijarah* lebih sering dikenal dengan system sewa, jasa, atau imbalan, adalah akad yang dilakukan atas dasar suatu manfaat dengan imbalan jasa.

a). Pembiayaan *Ijarah*

Ijarah adalah istilah dalam fiqih Islam dan berarti memberikan sesuatu untuk disewakan menurut Sayyid Sabiq, *Ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mrngsmbil manfaat dengan jalan penggantian.⁴⁸

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional No.27/DSN-MUI/III/2002 tentang *Al-Ijarah al-muntahiyah bi at-tamlik*, yang dimaksud dengan sewa beli yaitu perjanjian sewa-menyewa yang disertai opsi

⁴⁷Tim Penerjemah Al-Quran Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Quran, 2010), h. 363

⁴⁸Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2011), h. 99.

pemindahan kepemilikan atas benda yang disewa, kepada penyewa, setelah selesai masa sewa.⁴⁹

Adapun landasan hukum akad *Ijarah* Sebagaimana terdapat dalam Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-qashash ayat 26-27 yang berbunyi:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْبَتِ اسْتَعْجِرُهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَعَجَرْتَ
الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ
هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَجٍ ۖ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ
عِنْدِكَ ۖ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۚ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ
الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

Artinya: salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik".⁵⁰

3). Jual Beli

Jual beli (buyu', jamak dari bai') atau perdagangan atau perniagaan atau trading, secara terminology Fikih Islam berarti tukar menukar harta atas dasar saling ridha (rela) atau

⁴⁹A.Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 269.

⁵⁰Tim Penerjemah Al-Quran Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Quran, 2010), h. 706.

memindahkan kepemilikan dengan imbalan pada sesuatu yang diizinkan.⁵¹

Adapun landasan hukum jual beli dibolehkan di dalam Syariah Islam Sebagaimana terdapat dalam Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*⁵²

(1) Murabahah

Menurut Fatwa DSN no.04/DSN-MUI/IV/2000 *Murabahah* yaitu bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, Bank Syariah perlu memiliki fasilitas *Murabahah* bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.⁵³

⁵¹ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 25.

⁵² Tim Penerjemah Al-Quran Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Quran, 2010), h. 65.

⁵³ Osmad Muhaher, *Akuntansi Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 57.

Menurut PSAK 102 Akuntansi *Murabahah*, paragraf 5 menyatakan bahwa *murabahah* akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan bahwa biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.⁵⁴

Adapun ayat memperbolehkan jual beli diantaranya dibolehkan di dalam Syariah Islam Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*.⁵⁵

(2). Pembiayaan *Istishna*

Bai'istishna yaitu akad jual beli, dimana bank memesan barang terlebih dahulu yang diinginkan sesuai dengan spesifikasi dan kejelasan barang yang akan dipesan, dan dengan margin yang disepakati bersama dan pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan apakah dimuka, cicilan, ataupun dibayar belakangan.⁵⁶

Kebutuhan modal kerja usaha perdagangan untuk membiayai barang dagangan dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola jual beli. Dengan berjual beli

⁵⁴ Rizal Yaya, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer* (Jakarta: Salemba 4, 2009), h. 180.

⁵⁵ Tim Penerjemah Al-Quran Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Quran, 2010), h. 75.

⁵⁶ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2011), h. 96.

kebutuhan modal kerja usaha kerajinan dan produsen kecil juga dapat

juga dipenuhi dengan akad istishna'. Dalam hal ini bank syariah menyuplai mereka dengan input produksi sebagai modal istishna' yang ditukar dengan komoditas mereka untuk dipasarkan kembali.⁵⁷

6. Ciri-Ciri Pembiayaan Syariah

Secara teoritis, ada tiga hal yang menjadi ciri-ciri pembiayaan syariah, yaitu:

- a. Bebas bunga (interest free)

Terdapat pada QS. Ali Imron:130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَرْبَآءَ أَمْوَالِكُمْ مِّمَّا كَسَبْتُمْ مَضْغَفَةً وَتَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.*

- b. Perhitungan bagi hasil dilakukan pada saat transaksi berakhir. Hal ini berarti pembagian hasil dilakukan setelah ada keuntungan riil, bukan berdasar pada asumsi bahwa besarnya keuntungan usaha yang akan diperoleh di atas bunga kredit. Penggunaan kata pinjam-meminjam dalam perbankan syariah kurang tepat digunakan disebabkan dua hal, yaitu:

⁵⁷ Ibid, h. 125.

- 1). Pinjaman merupakan salah satu metode hubungan finansial dalam Islam. Masih banyak metode yang diajarkan oleh lembaga keuangan syariah selain pinjaman, seperti jual beli, bagi hasil, sewa, dan sebagainya.
- 2). Dalam Islam pinjam-meminjam adalah akad sosial, bukan akad komersial. Artinya, bila seseorang meminjam sesuatu, ia tidak boleh disyaratkan untuk memberikan tambahan atas pokok pinjamannya.⁵⁸

B. Strategi Mengurangi Pembiayaan Bermasalah di Baitul Mal Wattmwil

1. Pembiayaan bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah membayar cicilan sejumlah uang tertentu dari harga yang disepakati dengan waktu yang melampaui batas pembayaran atau angsuran yang telah ditentukan. Kemungkinan masalah keterlambatan peminjam melunasi cicilannya serta berbagai konsekuensinya yang membahayakan pemberi pinjaman termasuk persoalan penting. Bila masih ada beberapa problematika yang dikomentari yaitu barometer yang bersifat permanen, tidak bisa diubah.⁵⁹

a. Timbulnya Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah dapat disebabkan oleh salah satu atau beberapa factor yang harus dikenali secara dini oleh pejabat

⁵⁸Mhd. Asaad, "Peningkatan Peranan Perbankan Syariah Untuk Pembiayaan Usaha Pertanian". *Jurnal Ekonomi Miqot*, Vol. Xxxv. No. 1 Januari-Juni 2011, h. 120.

⁵⁹Soerjono. Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, h. 268

pembiayaan karena adanya unsur kelemahan baik dari sisi debitur, sisi bank maupun ekstern debitur dan bank, yaitu:⁶⁰

1). Sisi Nasabah

(a). Faktor keuangan

- (1). Hutang meningkat sangat tajam,
- (2). Hutang meningkat tidak seimbang dengan peningkatan aset,
- (3). Pendapatan bersih menurun,
- (4). Penurunan penjualan, biaya umum dan administrasi meningkat, Perubahan kebijakan dan syarat-syarat penjualan secara pembiayaan
- (5). Rata-rata umur piutang bertambah lama sehingga perputaran piutang semakin lambat
- (6). Rata-rata umur piutang bertambah lama sehingga perputaran piutang semakin lambat.
- (7). Piutang tak tertagih meningkat,
- (8). Perputaran persediaan semakin meningkat,
- (9). Keterlambatan memperoleh neraca nasabah secara teratur,
- (10). Tagihan yang terkonsentrasi pada pihak tertentu

(b). Faktor operasional

- (1). Hubungan nasabah dengan mitra usahanya makin turun,

⁶⁰*Ibid.*,h. 269

- (2). Terhambatnya pasokan bahan baku/bahan penolong,
- (3). Kehilangan satu atau lebih pelanggan utama,
- (4). Pembinaan sumber daya manusianya kurang baik,
- (5). Operasional perusahaan mencemari lingkungan.

2). Sisi Eksternal

Yang dapat diidentifikasi sebagai penyebab pembiayaan bermasalah:

Perubahan kebijakan pemerintah di sektor riil,

- a) Peraturan yang bersifat membatasi dan berdampak besar atas situasi keuangan dan operasional serta manajemen nasabah,
- b) Kenaikan harga faktor-faktor produksi yang tinggi,
- c) Perubahan teknologi yang sangat kuat dalam industri yang diterjuni oleh nasabah,
- d) Meningkatnya suku bunga pinjaman,
- e) Resesi, devaluasi, inflasi, deflasi, dan kebijakan moneter lainnya,
- f) Peningkatan persaingan dalam bidang usahanya,
- g) Bencana alam,
- h) Munculnya protes dari masyarakat sekitar lokasi usaha.

c).Sisi Bank

Yang dapat diidentifikasi sebagai penyebab pembiayaan bermasalah:

- a) Buruknya perencanaan finansial atas aktifa tetap/modal kerja,
- b) Adanya perubahan waktu dalam permintaan pembiayaan musiman,
- c) Menerbitkan cek kosong,
- d) Gagal memenuhi syarat-syarat dalam perjanjian pembiayaan,
- e) Adanya over pembiayaan atau under financing,
- f) Manipulasi data,
- g) Over taksasi agunan atau penilaian agunan terlalu tinggi.
- h) Pembiayaan topengan, tampilan atau fiktif,
- i) Kelemahan analisa oleh pejabat pembiayaan sejak awal proses pemberian pembiayaan,
- j) Kelemahan dalam pembiaanaan dan monitoring pembiayaan.⁶¹

2. Penggolongan Kualitas Pembiayaan

Ketidak lancarn nasabah membayar angsuran pokok maupun bagi hasil/ profit margin pembiayaan mengakibatkan adanya kolektabilitas pembiayaan. Secara umum kolektabilitas pembiayaan dikategorikan menjadi empat macam, yaitu:⁶²

a. Lancar atau kolektabilitas

- 1) Pembayaran tepat waktu, perkembangan rekening baik, tidak ada tunggakan, serta sesuai dengan persyaratan pembiayaan.

⁶¹Soerjono. Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, h. 269-270

⁶² Soerjono. Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, h. 252

- 2) Hubungan debitur dengan bank baik dan debitur selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan akurat.
- 3) Dokumentasi pembiayaan lengkap dan pengikatan agunan kuat.

b. Kurang lancar atau kolektabilitas

- 1) Terdapat tunggakan bayaran pokok dan atau bagi hasil yang telah melampaui 90 hari sampai dengan 180 hari.
- 2) Terdapat *cerukan/ overdraft* yang berulang kali hususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas
- 3) Hubungan debitur dan bank memburuk dan informasi keuangan debitur tidak dapat dipercaya
- 4) Dokumentasi pembiayaan kurang lengkap dan pengikatan agunan yang lemah
- 5) Pelanggaran terhadap persyaratan pokok pembiayaan
- 6) Perpanjangan pembiayaan untuk menyembunyikan kesulitan keuangan

c. Diragukan atau kolektabilitas

- 1) Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan
- 2) atau bagi hasil yang telah melampaui 180 hari sampai dengan 270 hari
- 3) Terjadi *cerukan/ overdraft* yang bersifat permanen hususnya

untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas

- 4) Hubungan debitur dan bank memburuk dan informasi keuangan debitur tidak tersedia atau tidak dapat dipercaya
- 5) Dokumentasi pembiayaan tidak lengkap dan pengikatan agunan yang lemah
- 6) Pelanggaran yang *principal* terhadap persyaratan pokok perjanjian pembiayaan

d. Macet atau kolektabilitas

- 1) Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bagi hasil yang telah melampaui 270 hari
- 2) Dokumentasi pembiayaan dan atau pengikatan agunan tidak ada⁶³

2. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

a. Pengertian Strategi

Kata “strategi” berasal dari bahasa Yunani, yaitu “strategos” (stratos = militer dan ag = memimpin), yang berarti “generalship” atau sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal perang dalam membuat rencana untuk memenangkan perang. Secara umum, strategi sebagai cara mencapai tujuan. Strategi merupakan rencana jangka panjang untuk mencapai tujuan. Strategi terdiri atas aktivitas-aktivitas penting yang diperlukan untuk mencapai tujuan penuh daya saing serta

⁶³ Soerjono. Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, h. 253-257

pendekatan-pendekatan bisnis untuk mencapai kinerja yang memuaskan sesuai target.⁶⁴

Strategi sebenarnya didasarkan pada analisis yang terintegrasi dan holistik. Artinya, setelah strategi disusun, semua unsur yang ada dalam organisasi sudah prespektif jangka panjang, strategi dirumuskan untuk merealisasikan visi dan misi korporasi.⁶⁵

b. Fungsi Strategi

Fungsi dari strategi pada dasarnya adalah berupaya agar strategi yang disusun dapat diimplementasikan secara efektif. Terdapat enam fungsi yang harus dilakukan secara simultan, yaitu :

- 1). Mengkomunikasikan suatu maksud (visi) yang ingin dicapai kepada orang lain. Strategi dirumuskan sebagai tujuan yang diinginkan, dan mengkomunikasikan, tentang apa yang akan dikerjakan, oleh siapa, bagaimana pelaksanaan pengerjaannya, untuk siapa hal tersebut dikerjakan, dan mengapa hasil kinerjanya dapat bernilai. Untuk mengetahui, mengembangkan dan menilai alternatif-alternatif strategi, maka perlu dilihat sandingan yang cocok atau sesuai antara kapabilitas organisasi dengan faktor lingkungan, di mana kapabilitas tersebut akan digunakan.
- 2). Menghubungkan atau mengaitkan kekuatan atau keunggulan organisasi dengan peluang dari lingkungannya

⁶⁴ Rachmat, Manajemen Strategik, Bandung : CV Pustaka Setia, 2014, h. 2.

⁶⁵ *Ibid.*, h. 6

- 3). Memanfaatkan atau mengeksploitasi keberhasilan dan kesuksesan yang didapat sekarang, sekaligus menyelidiki adanya peluang-peluang baru.
- 4). Menghasilkan dan membangkitkan sumber-sumber daya yang lebih banyak dari yang digunakan sekarang. Khususnya sumber dana dan sumber-sumber daya lain yang diolah atau digunakan, yang penting dihasilkannya sumber-sumber daya nyata, tidak hanya pendapatan, tetapi juga reputasi, komitmen karyawan, identitas merek dan sumber daya yang tidak berwujud lainnya.
- 5). Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan atau aktivitas organisasi ke depan. Strategi harus menyiapkan keputusan yang sesuai dan sangat penting bagi upaya untuk pencapaian maksud dan tujuan organisasi.
- 6). Menanggapi serta bereaksi atas keadaan yang baru dihadapi sepanjang waktu. Proses yang terus-menerus berjalan bagi penemuan maksud dan tujuan untuk menciptakan dan menggunakan sumber sumber daya, serta mengarahkan aktivitas pendukungnya.⁶⁶

c. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Dalam melakukan pembiayaan pasti sudah melakukan analisis atau penyelidikan terhadap calon debitur. Tetapi dalam perjalanannya akan banyak kemungkinan yang akan terjadi, seperti

⁶⁶ *Ibid.*, h. 7

pembiayaan macet. Dalam hal ini ada 2 kemungkinan yang terjadi, kesalahan dari pihak lembaga dan dai peminjam/debitur. Jika dari lembaga biasanya adanya kesalahan dalam analisis atau kurang teliti. Dan dari pihak debitur yang biasanya ada unsur kesengajaan dan tidak disengaja. Yang disengaja biasanya tidak ada kemauan si debitur untuk membayar angsuran pinjaman. Dan yang tidak disengaja biasanya adanya musibah, seperti kebakaran atau bencana alam lainnya.

Ada beberapa cara yang biasanya dilakukan untuk menyelamatkan pembiayaan macet, sebagai berikut :⁶⁷

1) Penjadwalan ulang (*rescheduling*)

Biasanya pihak lembaga akan melakukan perpanjangan jangka waktu kredit atau memperpanjang jangka waktu angsuran. Jika perpanjangan jangka waktu kredit itu contohnya jangka waktu nya 6 bulan, lalu diperpanjang menjadi 1 tahun. Jika jangka waktu angsuran nya contohnya angsuran yang diberika 36 kali, diperpanjang jadi 48 kali.

2) Diperbaiki (*reconditioning*)

Dilakukan dengan mengubah beberapa persyaratan yang ada seperti:

- a) Bunga dijadikan utang pokok.
- b) Penurunan suku bunga/persentase bagi hasilnya.

⁶⁷ Kasmir, *Bank dan Lembaga*, h. 110-111.

c) Pembebasan bunga/bagi hasil, hanya membayar pokoknya saja

3) *Restructuring*

Dengan menambah jumlah dana pembiayaan/kredit supaya dapat membantu si peminjam.

4) Penyitaan jaminan

Langkah terakhir yang akan di ambil oleh lembaga adalah penyitaan jaminan jika memang si peminjam benar-benar tidak dapat membayar semua hutang nya. Dan jaminan tersebut menjadi pihak lembaga dan bisa di jual untuk menggantikan dana yang di pinjam.

C. Koperasi Syariah

b. Pengertian Koperasi Syariah

Dilihat dari segi bahasa, secara umum koperasi berasal dari kata-kata latin yaitu, cum yang berarti dengan, dan apareri yang berarti kerja. Dari dua kata ini dalam bahasa inggris dikenal dengan istilah co dan operation yang dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah Cooperation veregening yang berarti bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu. sedangkan secara etimologi, koperasi ialah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang

bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela secara kekeluargaan.⁶⁸

Istilah bekerja sama berdasarkan atas asas kekeluargaan, secara otentik juga digunakan dalam konstitusi negara UUD 1945 sebagai tipologi sistem perekonomian nasional. Dalam penjelasannya, istilah usaha Bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan disebut koperasi. Dalam undang-undang 25 Tahun 1992 dinyatakan bahwa yang dimaksud koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasar atas asas kekeluargaan.⁶⁹

Dalam perjalanannya koperasi yang sebenarnya sangat sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia justru perkembangannya tidak mengembirakan. Koperasi yang dianggap sebagai anak kandung dan tulang punggung ekonomi kerakyatan justru hidupnya timbul tenggelam, sekalipun pemerintah telah berjuang keras untuk menghidupkan dan memberdayakan koperasi di tengah tengah masyarakat. Begitu banyak kemudahan yang diperoleh oleh badan hukum koperasi melalui berbagai fasilitas, namun tidak banyak mengubah kehidupan koperasi itu sendiri.⁷⁰

c. Dasar hukum *Baitul Mal Wattamwil*

a. Al-Qur'an

⁶⁸ R. T. Sutantya Rahardja Hadikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia* cet. II, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002) h. 1.

⁶⁹ Undang-undang Perkoprasian Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 1, Cet. I (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2007) h. 12

⁷⁰ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* Edisi Revisi ..., h. 252.

Dasar hukum koperasi syariah sebagaimana lembaga ekonomi Islam lainnya yakni mengacu pada sistem ekonomi Islam itu sendiri seperti tersirat melalui fenomena alam semesta dan juga tersurat dalam Al-Qur'an serta Al-Hadist Koperasi syariah antara lain:

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya : *Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu (Q.S. Al-Baqarah : 168).*⁷¹

Berdasarkan ayat di atas antara haq dan bathil, serta antara yang baik dengan yang buruk. Karena karakternya yang demikian buruk itulah maka Alquran selalu mengingatkan bahwa setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia, termasuk dalam melaksanakan tugas-tugas dunia usaha ekonomi dan keuangan dalam konteksnya yang luas (usaha ekonomi).⁷²

b. Hadist

Al-Hadits: Hadits riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ « إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا »

Artinya: *Dari Abu Hurairah, dia memarfu'kan hadis ini pada Nabi, bahwa Allah berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati*

⁷¹ Deprtemen Agama RI, *Al-Quran Dan Tajwid & Terjemahan*, (Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2010), h. 25.

⁷² Muhamad Amin Suma, *Tafsir Ayat Ekonomi*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2015), h. 113.

pihak lain. Dan jika salah satu berkhianat maka Aku keluar dari perserikatan mereka. (HR Abu Daud, 3385)⁷³

c. Undang-undang tentang Perkoperasian

Di Indonesia kebijakan mengenai perkoperasian sudah sejak lama ada seiring dengan keberadaan koperasi. Pada tahun 1958 kebijakan tentang perkoperasian diatur dalam UU No. 79 Tahun 1958. UU No. 79 Tahun 1958 bertitel tentang perkumpulan perkoperasian lalu pada tahun 1965 kebijakan tentang perkoperasian diperbarui dengan lahirnya UU No.14 Tahun 1965 dengan titel Undang - Undang tentang Perkoperasian. Pada tahun 1992 kembali dilakukan perubahan mengenai UU Perkoperasian tepatnya UU No. 25 Tahun 1992, kemudian ditahun 2012 kembali dilakukan perubahan UU Koperasi seiring dengan perkembangan aktivitas koperasi di Indonesia.⁷⁴

Lahirnya UU No. 17 Tahun 2012 Tentang perkoperasian banyak menimbulkan pro-kontra, sebaab banyak hal berbeda yang coba ditampilkan dalam rangka memperkuat koperasi Indonesia. Hingga saat ini status kelembagaan atau badan hukum yang memayungi keabsahan *Baitul mal wattamwil* adalah koperasi. Hal ini berarti kelembagaan *Baitul mal wattamwil* tunduk pada Undang-Undang Perkoperasian Nomor 17 tahun 2012 dan secara spesifik diatur dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor

⁷³ Ahmad Taufik Abdurahman, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2006), h. 363

⁷⁴Elfa Murdiana, "Menggagas Payung Hukum Baitul Maal Wat Tamwil Sebagai Koperasi Syariah Dalam Bingkai Ius Constituendum" *Jurnal Penelitian*, Vol. 10, No. 2, Agustus 2016, h. 281.

91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasai Jasa Keuangan Syariah (KJKS).⁷⁵

d. Tujuan, dan Manfaat *Baitul Maal Wat Tamwil*

a. Tujuan Koperasi Syariah

yaitu untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pengertian tersebut dapat dipahami bahwa koperasi syariah berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan umat. Sehingga dengan menjadi anggota Koperasi syariah masyarakat dapat meningkatkan taraf hidupnya melalui peningkatan usaha-usahanya.⁷⁶

b. Manfaat Koperasi Syariah

Adapun Manfaat dari Koperasi Syariah antara lain yaitu :

- 2) Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampun potensi ekonomi anggota, kelompok anggota muamalat (Poksuma) dan daerah kerjanya.
- 3) Meningkatkan kualitas SDM anggota dan Poksuma menjadi lebih profesional dan Islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global.
- 4) Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota

⁷⁵EuisAmalia, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 2009), h. 242-243.

⁷⁶Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 128

- 5) Menjadi perantara keuangan (*financial intermediary*) antara lain sebagai shohibul maal dengan du'afa sebagai mudhorib, terutama untuk dana-dana sosial seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf, hibah dan lain- lain.
- 6) Menjadi perantara keuangan (*financial intermediary*), antara pemilik dana (*shohibul maal*), baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan pengguna dana (*mudhorib*) untuk pengembangan usaha produktif.⁷⁷

D. Tinjauan Pustaka

Adapun hasil penelitian terdahulu yang menjadi landasan pada penelitian ini adalah :

1. Muhammad Nasrullah "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Bina Insan Mandiri" Mengatakan bahwasanya dari hasil kesimpulan dari penulisan ini, Faktor penyebab pembiayaan bermasalah di KSPPS bina insan mandiri yaitu kondisi usaha anggota yang sedang menurun baik dalam segi keuntungan maupun mobilitas usaha, adanya itikad baik yang kurang baik dari anggota pembiayaan yang menunda-nunda pembayaran angsuran padahal dia mampu untuk membyarnya, kesehatan anggota pembiayaan yang menurun sehingga anggota pembiayaan terhambat dalam mencari nafkah yang menyebabkan tidak dapat mengangsur secara

⁷⁷ *Ibid.*, h. 131

rutin. Kurang telitinya pihak KSPPS Bina Insan Mandiri dalam menganalisa berkas maupun saat survey kepada calon anggota pembiayaan, kurangnya komunikasi terhadap anggota pembiayaan.⁷⁸

2. Heri Saputra “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di KJKS BMT Syariah Sejahtera Boyolali” Mengatakan bahwasanya dari hasil kesimpulanya yaitu, a. kondisi usaha nasabah pembiayaan yang lagi menurun. b. berhutang di tempat lain. c. adanya i'tikad kurang baik dari nasabah pembiayaan dengan menunda-nunda pembayaran padahal dia mampu untuk membayarnya. d. nasabah kurang cakap dalam mengelola usahanya. e. adanya kebijakan pemerintah, bencana alam, dan tindak kriminal. f. kurang teliti dalam memberikan pembiayaan. g. kurang hati-hati dalam memberikan pembiayaan. h. kurangnya komunikasi dengan nasabah.⁷⁹

3. Novemy Triyandari Nugroho dan Khabib Alia Akhmad “Strategi Penyelesaian Kredit Bermasalah Untuk Mencegah *Financial Distress* Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah” Mengatakan bahwasanya dari hasil kesimpulanya yaitu, pemberian pembiayaan harus menggunakan strategi dan analisis yang tajam sehingga dapat menekan resiko dan tercapainya keuntungan yang diharapkan, maka seorang *account credit* bisa meminimalisasi keterlambatan angsuran pembayaran pembiayaan.

Pembayaran berjalan dengan baik dan nasabah dapat membayar

⁷⁸Muhamad Nasrullah. “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah bina insan mandiri” *Jurnal Ekonomi* , Vol. 01. N0.1 Januari 2017., h. 9.

⁷⁹Heri Saputra. “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di KJKS BMT Syariah Sejahtera BOYOLALI” *Jurnal Muamat Syariah* Vol.13. No.4 Oktober 2013., h. 8.

kewajibanya kepada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dengan tepat waktu atau sebelum jatuh tempo sehingga kejadian kabur dari tanggung jawab tidak akan terjadi.⁸⁰

4. Dedi Mulyadi “Analisis Manajemen Kresit Dalam Upaya Meminimalkan Kredit Bermasalah” Mengatakan bahwasanya dari hasil kesimpulanya yaitu, Manajemen kredit yang dilakukan PT. BPR pintura abadi dalam upaya meminimalkan kredit bermasalah dengan melaksanakan fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksaian dan pengawasan.⁸¹
5. Vicilliawati Sudrajat dan Lucky Rahmawati “Analisis Straetegi Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Dalam Menekan Tingkat NPF Nomor 07/PER/DEP.6/IV/2016 Pada Bmt Madani Sepanjang “Mengatakan bahwasanya dari hasil kesimpulanya yaitu, untuk menekan NPF yang ada di BMT MADANI, sebagaimana tingkat NPF sangat penting untuk diperhatikan agar sesuai dengan batas minimal yang ada pada peraturan yang berlaku di Indonesia. Hal tersebut nantinya akan berdampak pada keberlangsungan BMT MADANI itu sendiri.”⁸²

⁸⁰Novemy Triyandari Nugroho, Khabib Alia Akhmad. “Strategi Penyelesaian Kredit Bermasalah Untuk Mencegah *Financial Distress* Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah” *Jurnal Senatib* Vol.2. No. 4 November 2017., h. 9.

⁸¹Dedi Mulyadi, “Analisis Manajemen Kredit Dalam Upaya Meminimalkan Kredit Bermasalah” *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Kreatif* Vol.1. No.2 Maret 2016., h 8.

⁸²Vicilliawati Sudrajat, Lucky Rachmawati. “Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Dalam Menekan Tingkat NPF Nomor 07/PER/DEP.6/IV/2016” *Jurnal Ekonomi Islam* Vol.2. No.2 Agustus 2019., h. 9.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A. Djazuli, Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat, Sebuah Pengenalan*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002.
- Abdullah Thamin dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Adesy Fordeby, *Ekonomi dan Bisnis Islam Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Al Arif Nur Rianto, *Dasar Dasar Ekonomi Islam*, Solo, PT Era Adicitra Intermedia, 2011.
- Alif Ma'had Tarbiyah Mubalghin Muhammadiyah, *Pedoman Pendirian BTM*, Bandar Lampung, 2008.
- Amalia Euis, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 2009.
- Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Antoni Muhammad Syafe'I, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Fred R David, *Manajemen Strategis*, Jakarta: Edisi 10 Gramedia, 2009.
- Idroes Ferrry N., *Manajemen Risiko Pembiayaan Cet. 1*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014
- Kaelan M.S, *Metode Penelitian Kualitatif Interdisiplinier*, Yogyakarta : Paradigma, 2012.
- Kasmir, *Manajemen Perbankan Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

- Lewis Mervyn K. dan Latifa M. Algaoud, *Perbankan Syariah, Prinsip, praktik dan prospek*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2003.
- Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, Jakarta : PT Kharisma Putra Utama, 2015.
- Muhamad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: YKPN, 2005.
- Muliadi Ahmad, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta: Akademia Permata, 2013, h. 3.
- Narbuko Cholid dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Osmad Muhaher, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 35.2/Per/M.KUM/X. Jakarta, 2011.
- Ridwan Muhammad, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Rivai Veitzhal dan Andria Permata Veitzhal, *Islamic Financial Management*, Jakarta: Raja Grafindo, 2008
- Soekanto Soerjono., *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Suma Muhamad Amin, *Tafsir Ayat Ekonomi*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2015.
- Taufik Abdurahman Ahmad, *Shahih Sunan Abu Daud*, Jakarta: Pustaka Azam, 2006.
- Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* Jakarta: Kompas Gramedia Building, 2012.
- Yaya Rizal, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer* Jakarta: Salemba 4, 2009.

JURNAL

Elfa Murdiana, "Menggagas Payung Hukum Baitul Maal Wat Tamwil Sebagai Koperasi Syariah Dalam Bingkai Ius Constituendum" *Jurnal Penelitian*, Vol. 10, No. 2, Agustus 2016.

Mhd. Asaad, "Peningkatan Peranan Perbankan Syariah Untuk Pembiayaan Usaha Pertanian". *Jurnal Ekonomi Miqot*, Vol. XXXV. No. 1 Januari-Juni 2011.

Mulyadi Dedi, "Analisis Manajemen Kredit Dalam Upaya Meminimalkan Kredit Bermasalah" *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Kreatif* Vol.1. No.2 Maret 2016.

Nasrullah Muhamad. "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Bina Insan Mandiri" *Jurnal Ekonomi* , Vol. 01. N0.1 Januari 2017.

Nugroho Novemy Triyandari, Khabib Alia Akhmad. "Strategi Penyelesaian Kredit Bermasalah Untuk Mencegah *Financial Distress* Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah" *Jurnal Senatib* Vol.2. No. 4 November 2017.

Saputra Heri. "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di KJKS BMT Syariah Sejahtera BOYOLALI" *Jurnal Muamat Syariah* Vol.13. No.4 Oktober 2013.

Sudrajat Vicilliawati, Lucky Rachmawati. "Analisis Strategi Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Dalam Menekan Tingkat NPF Nomor 07/PER/DEP.6/IV/2016" *Jurnal Ekonomi Islam* Vol.2. No.2 Agustus 2019.

Triyandari Novemy, "Strategi Penyelesaian Kredit Bermasalah Untuk Mencegah *Financial Distress* pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah" *Jurnal Senatib* Vol.01 No. 4 November 2017.

FATWA DSN MUI

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia , Fatwa DSN Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah*

UNDANG-UNDANG RI

Undang-undang No.21 Tahun 2008 Tentang Pembiayaan di Perbankan Syariah

AL-QUR'AN

Deprtemen Agama RI, *Al-Quran Dan Tajwid & Terjemahan*, Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2010.

Tim Penerjemah Al-Quran Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Quran, 2010.

KAMUS

Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi IV, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

WEBSITE

<http://www.btmhimu.id/tentang-kami/company-profile/>

